

**KINERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI
KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kelvin Ridho Ansori Putra

NPP. 31.0260

Asdaf Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: kelvin.ridho28@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Irwan Tahir, AP, M. Si

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): *The distribution of Village Fund Direct Cash Assistance is a form of assistance to people in need. This distribution is a form of social assistance to people who have difficulties, especially economic problems. BLT-DD distribution must be carried out transparently, quickly, and right on target to Beneficiary Families. However, in fact, in Central Bangka Regency, not all funds could be channeled to the registered KPM. In 2023, there were 2921 KPM recorded, while the funds that were distributed until the end amounted to 2915 people.* **Purpose:** *This study aims to evaluate the performance of the Social, Community and Village Empowerment Office in the distribution of direct cash assistance of the Village Fund in Central Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province.* **Methods:** *Data were obtained through direct observation in the field, interviews with staff of the Social Agency for Community and Village Empowerment, village officials, and the community, as well as analyzing documentation related to the distribution of assistance.* **Results:** *The results showed that the performance of the Social, Community and Village Empowerment Agency in distributing direct cash assistance for the Village Fund in Central Bangka Regency was not optimal.* **Conclusion:** *from the results of the study it can be concluded that the performance of the social, community and village empowerment offices is not optimal, this is based on several factors. To overcome these factors, it is necessary to increase the capacity of human resources in the field of village government and participate in monitoring and evaluating the performance of the village government.*

Keywords: *performance, Distribution, Village Fund Cash Transfer*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran ini merupakan bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama masalah ekonomi. Penyaluran BLT-DD harus dilakukan secara transparan, cepat, dan tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, pada kenyataannya, di Kabupaten Bangka Tengah, tidak semua dana dapat disalurkan kepada KPM yang terdaftar. Pada 2023, tercatat sebanyak 2921 KPM, sedangkan dana yang tersalurkan hingga akhir berjumlah 2915 orang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan staf Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perangkat desa, masyarakat, serta analisis dokumentasi terkait penyaluran bantuan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah belum optimal. **Kesimpulan:** dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum maksimal, hal ini didasari oleh beberapa faktor. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa dan ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa.

Kata kunci: Kinerja, Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu serius yang telah lama dihadapi oleh Indonesia. Saat ini, pemerintah sedang berjuang untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia. Kemiskinan menurut (Suparlan, 1995), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan adalah masalah nasional utama yang dihadapi Indonesia, yang penyelesaiannya membutuhkan tindakan yang lugas, imajinatif, komprehensif, dan kooperatif. Salah satu penyebab utama kemiskinan yang terjadi belakangan ini adalah wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Pada awal Tahun 2020 dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease atau disingkat dengan Covid-19, dimana virus ini berasal dari Wuhan, China dan virus ini resmi melanda di Indonesia pada awal Bulan Maret Tahun 2020, Virus tersebut menyebar ke seluruh Provinsi Indonesia (SASUWUK, LENGKONG, & PALAR, 2021). Pandemi ini menyebabkan munculnya permasalahan sosial, salah satunya yaitu menekan perekonomian dari berbagai aspek, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa (Maryam & Cahyani, 2022).

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan tekanan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap mobilitas perkonomiannya. Badan Pusat Statistik atau singkatan dari BPS memaparkan data mengenai Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari bulan Maret 2019–Maret 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 telah mencapai 26,42 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang (Firmansyah & Fanida, 2022). Tak terkecuali di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merasakan dampak adanya dari pandemi ini. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendes

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020. Dalam perpu Nomor 11 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Rahayuni & Rusli, 2021). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari dana Desa dan ditunjukkan bagi masyarakat yang kurang mampu atau kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Anggitaningsih, Anggraini, Karimah, & Adib, 2024). Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah dengan memberikan uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Program BLT dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2005 untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin. BLT ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Bantuan langsung tunai mengacu pada program yang menyediakan uang tunai kepada individu atau kelompok dengan cara langsung. Program BLT-DD bertujuan untuk membantu mereka dalam menghadapi situasi yang melibatkan pasar keuangan yang tidak stabil. Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Bangka Belitung yang menerapkan BLT-DD kepada masyarakat umum yang memenuhi persyaratan untuk menerima manfaat. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil. Dampak dari COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah yang tergolong signifikan. Dalam konteks penyaluran BLT-Dana desa, Dinas Sosial turut andil dalam menerapkan program tersebut. Kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan langsung tunai merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial tersebut. Sepanjang tahun 2023, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdata pada tahun 2023 berjumlah 2.921

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) umumnya fokus pada aspek keberhasilan dan dampak bantuan tersebut terhadap masyarakat penerima. Namun, penelitian yang mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) dalam proses penyaluran BLT-DD masih terbatas. Kesenjangan ini mencakup analisis rinci tentang efektivitas dan efisiensi penyaluran, serta kendala yang dihadapi oleh Dinsos PMD di Kabupaten Bangka Tengah. Banyak studi yang telah mengidentifikasi manfaat BLT-DD secara umum, tetapi sedikit yang mengeksplorasi bagaimana kinerja birokrasi lokal mempengaruhi hasil penyaluran Bantuan tersebut.

Selain itu, penelitian yang ada seringkali mengabaikan aspek koordinasi antara Dinsos PMD dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kinerja penyaluran BLT-DD sangat bergantung pada kerjasama yang baik antar lembaga, namun sedikit studi yang mengevaluasi sejauh mana kolaborasi ini terjadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi ketepatan waktu dan akurasi penyaluran bantuan. Kesenjangan ini penting untuk diteliti guna memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam memperbaiki proses penyaluran BLT-DD di masa mendatang.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD juga sering kali kurang mendapat perhatian. Banyak laporan yang menyebutkan adanya ketidakjelasan dalam proses

distribusi dan penggunaan dana, namun penelitian yang secara spesifik mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas Dinsos PMD dalam konteks ini masih jarang ditemukan. Penelitian yang menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelaporan dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD.

Terakhir, dampak sosial dari kinerja Dinsos PMD dalam penyaluran BLT-DD juga perlu dieksplorasi lebih lanjut. Meskipun banyak penelitian yang membahas manfaat ekonomi dari bantuan tunai ini, dampak sosial seperti perubahan pola interaksi masyarakat, persepsi terhadap pemerintah, dan potensi konflik sosial akibat ketidakadilan penyaluran bantuan masih kurang dianalisis. Meneliti aspek-aspek ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana kinerja Dinsos PMD mempengaruhi dinamika sosial di Kabupaten Bangka Tengah, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan di masa depan.



1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks kinerja. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novdiyanti, 2022) meneliti tentang Kinerja Dinas Sosial dalam Pengelolaan Data Program Keluarga Harapan mengemukakan bahwa Produktivitas merupakan sebuah pengukuran dalam menilai seberapa baik organisasi dalam memanfaatkan sumber daya dengan efektif dan efisien yang digunakan untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan oleh organisasi.

Penelitian (Popo, Singkoh, & Kumayas, 2022) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Manado” tahun 2022 mengungkapkan bahwa Kinerja dinas sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Manado yang akan dilihat dari output program dari dinas sosial Kota Manado, dan sesuai dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa program dinas sosial Kota Manado dalam penanganan anak jalanan di Kota sudah ditangani dengan baik, karena dalam hal ini dinas sosial kota Manado hadir dalam penanganan anak jalanan berupa memberikan beberapa bantuan, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan bagi anak jalanan yang ada di Kota Manado.

Penelitian (Toar, Liando, & Pangemanan, 2023) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Di Kabupaten Minahasa Selatan” mengungkapkan bahwa Kualitas, pada indikator ini peneliti melihat bahwa kualitas dari Dinas sosial Kabupaten Minahasa Selatan masih di nilai belum maksimal karena dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Penelitian (Andu, Nayoan, & Monintja, 2023) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado” mengungkapkan bahwa Berdasarkan indikator efisiensi, diketahui bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta program pemberian bantuan memang belum terlaksana dengan optimal dan penyebab dari hal tersebut yaitu belum adanya anggaran yang ditetapkan atau disediakan terutama dengan adanya pengaruh dari pandemi covid 19 yang berjalan beberapa tahun terakhir ini yang berimbas bagi beberapa organisasi publik salah satunya yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado

Penelitian (Sajow, Sambiran, & Kirupan) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado” mengungkapkan bahwa kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Penelitian (Latipah, Meigawati, & Mulyadi, 2021) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi” mengungkapkan bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan anak jalanan di Kota Sukabumi selalu memperhatikan faktor eksternal yang berfokus pada peluang dan ancaman serta faktor internal yang berfokus pada kekuatan dan kelemahan. Peluang yang dapat mendorong keberhasilan program penanganan anak jalanan ialah adanya perencanaan program dan kebijakan yang diarahkan pada terciptanya tujuan penanganan anak jalanan yaitu mengembalikan fungsi sosial para anak jalanan. Namun demikian, kelemahan yang timbul saat ini adalah adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Kota Sukabumi.

Penelitian (Yuliana, Isabella, & Febriyanti, 2022) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial dalam Melaksanakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang” mengungkapkan bahwa Kegiatan bakti sosial dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan di kota Palembang dinilai kurang berhasil karena anak saya merantau selalu kembali ke jalanan. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menyambut anak jalanan adalah anakanak berkeliaran kembali ke jalanan bahkan setelah mereka ditempatkan. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Di nas Sosial adalah dengan melakukan propaganda yaitu mendorong masyarakat untuk tidak memberikan uang atau apapun kepada anak jalanan. Namun, ini tidak efektif dalam mencegah anak-anak berkeliaran kembali ke jalanan. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil analisis menggunakan indikator kinerja teoritis.

Penelitian (Pangaribuan, 2021) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Pematangsiantar” mengungkapkan bahwa Penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan teori penilaian kinerja menurut Agus Dwiyanto. Indikator dalam teori tersebut terdiri dari Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian dengan menggunakan data yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Kota Pematangsiantar sudah baik. Dasar penilaian ini dapat dilihat pada persentase penyaluran bantuan yang telah dilaksanakan.

Penelitian (Raasdiana & Isnah, 2021) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros” mengungkapkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan yang didasarkan pada aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas maka ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran dana bantuan social kepada masyarakat di desa Marannu Kabupaten Maros belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang maksimal karena dari aspek akuntabilitas ada data yang tidak valid sebab menggunakan data tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ada yang tidak menerima bantuan sosial.

Penelitian (Simatupang, 2022) yang berjudul “Kinerja Dinas Sosial dalam Rehabilitas Pasca Konflik Sosial 23 September 2019 di Kabupaten Jayawijaya” mengungkapkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian analisis dari indikator yang dibahas dalam pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya yaitu Kinerja Dinas Sosial dalam rehabilitasi pasca konflik sosial 23 september 2019 di Kabupaten Jayawijaya sudah dapat dikatakan cukup baik. Peneliti mengukur kinerja organisasi dengan lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keempat indikator sudah cukup baik karena sudah sesuai harapan akan hasil kerja yang ingin dicapai; Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Tetapi, indikator Produktivitas bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif. Teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang

saya gunakan yakni teori kinerja menurut (Wibowo, 2016) yang menjelaskan kinerja memiliki 4 dimensi yaitu masukan, proses, keluaran, dan manfaat.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan, yaitu dengan cara mengumpulkan data lalu menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan di lapangan. Menurut (Creswell, 2023) *Qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human. The research process involves emerging questions and procedures, data typically collected in the participant's setting, data analysis inductively building from particulars to general themes, and the researcher making interpretation of the meaning of the data.*

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. (Simangunsong, 2017) menyatakan Pada dasarnya jenis data antara penelitian kualitatif pada penelitian pemerintahan itu prinsipnya sama yaitu data primer dan data sekunder, namun yang membedakannya hanya “cara mendapatkan data primer dan hasil dari data primer tersebut”.

Penulis melakukan wawancara dengan 11 informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Menurut (Moelong, 2014) menyatakan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berperan penting dalam proses penelitian karena sangat membantu peneliti dalam mendapatkan sumber data dan informasi. Menurut (Sugiyono, 2013) “Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.”

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan teori kinerja dari (Wibowo, 2016) yang menyatakan bahwa mengukur kinerja dapat dilihat dari 4 aspek yaitu masukan, proses, keluaran, dan manfaat.

3.1. Masukan

3.1.1. Sumber Dana

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah tentu Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membutuhkan berbagai macam sumber daya untuk menjalankannya. Salah satu faktor penting dalam melaksanakan BLT-Dana Desa ini ialah sumber dana. Dana atau anggaran merupakan faktor penting demi berjalannya suatu kegiatan atau program. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menggunakan sumber dana yang diambil dari Dana Desa. Untuk tahun 2022 dana untuk BLT-Dana Desa mempunyai minimal penganggaran sebesar 40%. Menurut (Menggala, 2023) sumber faktor penting dari penyaluran BLT-DD adalah sumber dana, dana atau anggaran merupakan kunci utama dari proses kegiatan penyaluran. Dana BLT-Dana Desa bersumber dari dana desa yang ditransferkan oleh pusat langsung kepada desa dan tidak melalui kabupaten sehingga tidak

menyebabkan terjadinya beberapa masalah seperti kekurangan saldo pada saat penyaluran BLT-Dana Desa dan mengantisipasi jumlah BLT-Dana Desa tidak dikurangi oleh oknum pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendayagunaan sumber daya telah dilakukan dengan baik.

3.1.2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa membutuhkan peralatan teknis dalam prosesnya atau yang biasa disebut fasilitas sarana prasarana. Fasilitas ini digunakan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan BLT-Dana Desa mulai dari pendataan sampai penyaluran. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan BLT-Dana Desa. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana DINSOS-PMD Bangka Tengah

No	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	TANAH	0
2.	PERALATAN DAN MESIN	
	a. Alat Bantu	1
	b. Alat Angkutan Darat Bermotor	5
	c. Kendaraan Bermotor Roda Dua	9
	d. Alat Kantor	1
	e. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	36
	f. Alat Kantor Lainnya	41
	g. Alat Rumah Tangga	86
	h. Alat Pembersih	1
	i. Alat Pendingin	22
	j. Alat Rumah Tangga Lainnya	20
	k. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28
	l. Lemari dan Arsip Pejabat	2
	m. Alat Studio	6
	n. Komputer	53
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	a. Bangunan Gedung Tempat Kerja	11
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	a. Jalan	5
	b. Bangunan Air Kotor	4
	c. Iritasi Air Bersih/Air Baku	3
	d. Instalansi Jaringan Listrik	3
5.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
TOTAL		337

Sumber: Renstra DINSOS-PMD Kabupaten Bangkan Tengah 2021-2026

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sudah cukup memadai terlebih guna pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

3.2. Proses

3.2.1. Transparansi dalam Penyaluran

Tingkat transparansi dalam proses penyaluran bantuan ini sangat penting apalagi berkaitan dengan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dinas Sosial PMD memiliki peran penting dalam hal transparansi ini sehingga harus sering memonitor dalam setiap kegiatan penyaluran yang ada agar semua dana tersalurkan bisa dilaksanakan dengan semestinya. Tingkat transparansi yang dilakukan oleh DINSOS-PMD sudah baik karena hal ini dibuktikan tidak adanya protes dari masyarakat mengenai tidak transparannya dalam tahap penyaluran. Faktor lain yang menyebabkan transparannya ialah dana yang diterima oleh masyarakat sekarang sudah tidak lagi secara tunai melainkan ditransferkan melalui bank. DINSOS-PMD pun turut melakukan pengawasan dan koordinasi selalu dengan pihak bank mengenai penyaluran dana tersebut. Selain dengan pihak bank, DINSOS-PMD juga turut melakukan koordinasi dengan perangkat desa. Perangkat desa juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan musyawarah desa dalam menentukan warga yang layak dalam penerimaan bantuan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

3.2.2. Kecepatan dan Ketepatan dalam Penyaluran

Kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai juga menjadi faktor penting dalam proses kegiatan penyaluran. Pemerintah harus bisa mengusahakan kecepatan proses penyaluran agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Sedangkan untuk ketepatan, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan mengenai BLT tersebut. Pemerintah harus memastikan kembali bahwa masyarakat yang menerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria. Dalam hal kecepatan dan ketepatan, pemerintah mengacu pada PMK Nomor 145 dan 146 Tahun 2023 mengenai SOP pencairan BLT-DD. Adapun SOP-nya adalah:

1. Perencanaan dan Persiapan

A. Identifikasi dan Verifikasi Penerima:

- 1) Pemerintah Desa melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima BLT-DD sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
- 2) Data penerima yang telah diverifikasi kemudian disahkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk penetapan penerima BLT-DD.

B. Penyusunan Dokumen:

- 1) Pemerintah Desa Menyusun daftar penerima manfaat yang telah disahkan Musdesus.
- 2) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk BLT-DD sesuai dengan alokasi dana desa yang tersedia.

2. Pengajuan Pencairan

A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal:

- 1) Pemerintah desa Menyusun proposal pengajuan pencairan BLT-DD yang mencakup daftar penerima manfaat, RAB, dan berita acara Musdesus.
- 2) Proposal pengajuan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/kota.

B. Verifikasi dan Persetujuan:

- 1) DPMPD Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa.
- 2) Setelah verifikasi, DPMPD Kabupaten/kota memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk pencairan BLT-DD.

3. Pencairan Dana

A. Transfer Dana:

- 1) Setekah mendapatkan persetujuan dari DPMPD, Pemerintah Kabupaten/kota melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer dana BLT-DD ke rekening kas desa.

B. Pencairan dan Distribusi:

- 1) Pemerintah Desa melakukan pencairan dana dari rekening kas desa sesuai dengan daftar penerima yang telah disahkan.
- 2) Dana BLT-DD didistribusikan langsung kepada penerima manfaat melalui mekanisme yang transparan dan akintabel, seperti melalui rekening bank penerima atau secara tunai dengan bukti penerimaan yang lengkap.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

A. Pelaporan:

- 1) Pemerintah Desa wajib Menyusun laporan penggunaan BLT-DD secara periodic, meliputi jumlah dana yang dicairkan dan disalurkan, serta bukti-bukti penerimaan oleh penerima manfaat.
- 2) Laporan disampaikan kepada DPMPD Kabupaten/kota sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana.

B. Audit dan Monitoring:

- 1) DPMPD Kabupaten/kota bersama Inspektorat Daerah melakukan audit dan monitoring terhadap penggunaan dana BLT-DD untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku
- 2) Temuan audit dan monitoring digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program di periode berikutnya.

Tingkat kecepatan dan ketepatan penyaluran sudah baik, hanya saja terkendala di awal tahun yang harus dirapelkan karena menunggu anggaran turun terlebih dahulu. Akan tetapi untuk bulan selanjutnya dilaksanakan tepat waktu yaitu sebulan sekali.

3.3. Keluaran

3.3.1. Penyaluran BLT-DD Tersalurkan ke Masyarakat

Proses penyaluran merupakan kunci utama dari kegiatan penyaluran BLT-DD itu sendiri. Seluruh jajaran baik dari DINSOS-PMD maupun perangkat desa harus bisa memastikan apakah dana dari bantuan tersebut sudah sampai ke masing-masing masyarakat yang menerima bantuan tersebut atau belum. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus turut aktif berkoordinasi dengan pihak bank maupun perangkat desa untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah sampai ke masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau belum.

Tabel 3.2

Data Realisasi BLT-DD Tahun 2023

No	Nama Desa	Jumlah KPM Terdata	Terealisasikan
1	Air Mesu	50	50
2	Air Mesu Timur	57	57
3	Baskara Bakti	56	56
4	Batu Belubang	47	47
5	Batu Beriga	47	47
6	Belilik	60	57
7	Belimbing	30	30
8	Beluluk	55	55

9	Benteng	63	63
10	Beruas	50	50
11	Bukit Kijang	51	51
12	Cambai	49	49
13	Cambai Selatan	54	54
14	Celuak	45	45
15	Guntung	34	33
16	Jelutung	52	52
17	Jeruk	50	50
18	Katis	48	48
19	Kayu Besi	35	35
20	Kebintik	51	51
21	Kemingking	30	30
22	Kerakas	56	56
23	Kerantai	38	38
24	Keretak	59	59
25	Keretak Atas	45	45
26	Kulur	53	53
27	Kulur Ilir	54	54
28	Kurau	51	51
29	Kurau Barat	51	51
30	Lampur	37	37
31	Lubuk Besar	74	74
32	Lubuk Lingkok	63	63
33	Lubuk Pabrik	71	70
34	Mangkol	57	57
35	Melabun	36	36
36	Munggu	70	70
37	Namang	50	50
38	Nibung	72	72
39	Padang Baru	50	50
40	Pasir Garam	53	53
41	Pedindang	57	57
42	Penyak	65	65
43	Perlang	73	73
44	Pinang Sebatang	50	50
45	Puput	25	25
46	Romadhon	56	56
47	Sarangmandi	56	56
48	Simpang Katis	48	48
49	Sungai Selan Atas	33	32
50	Sungkap	54	54
51	Tanjung Gunung	79	79
52	Tanjung Pura	32	32
53	Terak	63	63

54	Terentang III	62	62
55	Teru	59	59
56	Trubus	55	55
TOTAL		2.921	2.915

Sumber: DINSOS-PMD Kabupaten Bangka Tengah, diolah penulis 2024

Sesuai dengan data yang ada, dapat terlihat dari awalnya jumlah KPM yang terdata yaitu berjumlah 2.921 KPM yang terealisasi hingga akhir hanya 2.915 KPM. Hal ini didasari karena adanya penduduk yang meninggal maupun pindah jiwa.

3.3.2. Kegiatan Terlaksanakan Secara Cepat dan Tepat

Pelaksanaan BLT-Dana Desa secara tepat waktu diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi COVID-19. Harapan pemerintah terwujud pada tahun 2020 dan 2022, hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, pada tahun 2021 jumlah masyarakat miskin mengalami pelonjakan dibandingkan tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 pelaksanaan BLT-Dana Desa disalurkan secara tepat waktu sama seperti tahun 2020 dan 2022. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa di Kabupaten Bangka Tengah diberikan tepat waktu setiap bulannya, kecuali untuk pemberian BLT-Dana Desa 3 bulan pertama diberikan pada bulan ke-3.

3.4 Manfaat

3.4.1. Dampak Positif Bagi Organisasi

Semenjak pandemi COVID-19, warga banyak kehilangan mata pencahariannya yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa pendistribusian BLT-DD ini pastinya sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah dalam hal ini DINSOS-PMD berupaya semaksimal mungkin dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan agar dampaknya bisa terasa langsung bagi masyarakat itu sendiri. Selain berdampak terhadap masyarakat, tentunya juga DINSOS-PMD akan merasakan dampak positifnya dari kegiatan penyaluran tersebut, terlebih lagi DINSOS-PMD yang menangani langsung kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah. DINSOS-PMD sebagai dinas yang menangani permasalahan ini sangat merasakan dampak positifnya. Pegawai DINSOS-PMD merasa sangat senang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dari penyaluran dana BLT-DD tersebut dan kegiatan yang dilakukan oleh DINSOS-PMD bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.

3.4.2. Dampak Positif Bagi Masyarakat

Kegiatan penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat banyak sekali memberikan dampak positif atau manfaat, antara lain memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, modal usaha, dan yang lainnya. Masyarakat sangat terbhantu dengan adanya kegiatan tersebut, Dimana masyarakat bisa memanfaatkannya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan bisa dijadikan modal usaha

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini banyak memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat yang kurang baik membuat masyarakat terbantu atas kegiatan tersebut. Keberhasilan kegiatan tersebut tidak luput dari Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini yang menangani kegiatan penyaluran BLT-DD tersebut.

Dalam kegiatan penyaluran, DINSOS-PMD didukung oleh beberapa faktor dalam proses kegiatan yaitu penyaluran dana sudah melalui *non tunai* atau *transfer*. Koordinasi yang dilakukan antara DINSOS-PMD dengan perangkat desa menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dari kegiatan tersebut.

Selain faktor pendukung, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga memiliki faktor penghambat antara lain tidak semua tersalurkan dana ke semua KPM yang terdata yang disebabkan adanya penduduk yang meninggal maupun pindah jiwa sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya (Raasdiana & Isnah, 2021) yang mengungkapkan bahwa Kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Maros belum sepenuhnya menunjukkan kinerja yang maksimal karena dari aspek akuntabilitas ada data yang tidak valid sebab menggunakan data tahun 2017 sehingga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ada yang tidak menerima bantuan sosial.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari sumber dayanya yang sudah mencukupi. Namun ada beberapa hal yang kurang yang dialami oleh DINSOS-PMD. Kendala yang terjadi berupa kurangnya pegawai dari DINSOS-PMD sehingga tidak bisa melakukan monitoring secara menyeluruh ke 56 desa yang tersebar di Kabupaten Bangka Tengah. DINSOS-PMD Kabupaten Bangka Tengah hanya bisa terjun langsung di beberapa desa untuk melakukan penyaluran secara langsung Bersama Bapak Bupati Bangka Tengah, selebihnya hanya menerima laporan dari Pemerintah Desa mengenai penyaluran BLT-Dana Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ialah, proses penyaluran yang dilakukan sudah melalui *non tunai* atau *transfer* dari Bank BRI. DINSOS-PMD bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyaluran ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam proses kegiatan penyaluran dan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian faktor pendukung lain ialah adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa yang membantu Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dalam kegiatan Penyalran BLT-DD. Adapun faktor penghambat yang dialami adalah kurangnya personil pada Bidang Pemerintahan Desa sehingga proses penyaluran secara langsung ke 56 desa tidak bisa dilakukan langsung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Faktor lain yang menjadi penghambat ialah proses pencairan yang terlambat di beberapa desa. Hal ini diakibatkan karena terlambatnya proses pengajuan pencairan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada bank. Bank sendiri memiliki prosedur tertentu dalam proses pencairan sehingga ketika perangkat desa mengajukan pencairan maka dana tidak bisa dicarikan di hari yang sama, harus mengikuti prosedur bank yang ada. Dikarenakan keterlambatan yang dilakukan perangkat desa, sehingga membuat penyaluran bantuan pada bulan itu sedikit terlambat. Dana bisa saja dicairkan dipertengahan bulan sampai dengan akhir bulan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang singkat sehingga peneliti belum bisa menganalisis lebih dalam mengenai hambatan dalam kegiatan penyaluran BLT-DD.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Penelitian

selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan model analisis yang lebih kompleks untuk mengidentifikasi secara lebih akurat faktor-faktor yang menghambat kegiatan penyaluran serta menganalisis dampaknya secara lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah atas kerjasama, dukungan, dan kontribusi yang luar biasa dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan bantuan dari pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penelitian ini tidak akan terwujud. Kontribusi yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat berharga dalam memperkaya hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penyaluran BLT-DD di Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya yang tidak ternilai harganya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andu, J. C., Nayoan, H., & Monintja, D. K. (2023). Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Merehabilitas Gelandangan dan Pengemis di Koya Manado. *Jurnal Governance*.
- Anggitaningsih, R., Anggraini, N. N., Karimah, N., & A. K. (2024). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023 Kepada Pemerintah Desa. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 198-202.
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United States of America: SAGE.
- Firmansyah, W. I., & Fanida, E. H. (2022). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA KEPATIHAN. 261-272.
- Latipah, S., Meigawati, D., & Mulyadi, A. (2021). Kinerja Dinas Sosial Menangani Anak Jalanan di Kota Sukabumi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*.
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana. *Politik dan Pemerintahan Daerah*, 50-72.
- Menggala, L. P. (2023). EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA .
- Moelong, J. L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novdiyanti, D. W. (2022). KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENGELOLAAN DATA PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA .

Pangaribuan, W. S. (2021). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Pematangsiantar.

Popo, C. D., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2022). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Manado . *Jurnal Governance*.

Raasdiana, & Isnah. (2021). Kinerja Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat di Desa Marannu Kabupaten Maros. *Public Adiministration Jurnal*.

Rahayuni, W., & Rusli, Z. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN GUNUNG TOAR.

Sajow, A., Sambiran, S., & Kirupan, J. (t.thn.). Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado. *Jurusan Ilmu Pemerintahan 2019*.

SASUWUK, C. H., LENGKONG, F. D., & PALAR, N. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Simatupang, U. (2022). Kinerja Dinas Sosial dalam Rehabilitas Pasca Konflik Sosial 23 September 2019 di Kabupaten Jayawijaya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. PT. Alfabeta.

Suparlan, P. (1995). *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Toar, C. W., Liando, D. M., & Pangemanan, F. N. (2023). Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yuliana, Y., Isabella, & Febriyanti, D. (2022). KINERJA DINAS SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*.